

**KINERJA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015-2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Diajukan oleh**

**FAQIH PRASETYO AULIYA  
NIM. 07011381419129**

**Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Palembang  
Oktober 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**KINERJA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015-2017**

**Skripsi**

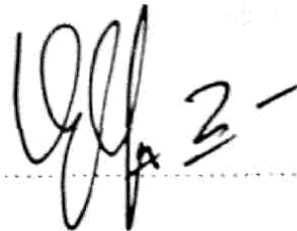
**Oleh:**

**FAQIH PRASETYO AULIYA  
07011381419129**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 13 Maret 2018**

**Pembimbing I**

**Dr. Nengyanti, M. Hum  
NIP. 196704121992032002**

Handwritten signature of Dr. Nengyanti, M. Hum, written in black ink on a white background. The signature is stylized and includes a horizontal line at the end.

**Pembimbing II**

**Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001**

Handwritten signature of Ermanovida, S.Sos., M.Si, written in black ink on a white background. The signature is stylized and includes a horizontal line at the end.

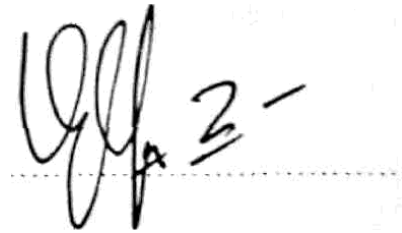
## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “*Kinerja Anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2015-2017*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Oktober 2018.

Palembang, 11 Oktober 2018

**Ketua:**

**1. Dr. Nengyanti, M. Hum**  
NIP. 196704121992032002



**Anggota:**

**1. Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001



**2. Drs. Joko Siswanto, M. Si**  
NIP. 195706051985031003



**3. Dra. Martina, M. Si**  
NIP. 196603051993022002

**Mengetahui:**

**Dekan FISIP**



**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001

**Ketua Jurusan Administrasi Negara**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto :

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan”

(Jim Rohn)

Atas Rahmat Allah SWT,

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku
2. Saudara dan saudariku
3. Mahasiswa Administrasi Negara 2014
4. Almamaterku

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang maksimalnya realisasi anggaran belanjadi Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Untuk mengetahui permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah Teori Rasio Mahmudi yang melihat permasalahan tersebut dari 3 indikator yaitu, analisis keserasian belanja, analisis pertumbuhan belanja dan rasio efisiensi. Selain itu, dilakukan analisis dengan membandingkan kinerja anggaran selama 3 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran analisis data kuantitatif dan laporan keuangan berupa target dan realisasi anggaran dan metode kualitatif dengan analisis hasil wawancara mendalam terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2015 sampai dengan 2017 yang dilihat dari indikator analisis rasio pertumbuhan belanja dan analisis belanja sudah baik. Sementara jika dilihat dari indikator analisis keserasian belanja belum baik. Penelitian ini merekomendasikan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat harus meningkatkan nilai belanja operasi dan belanja langsung sehingga dapat terjadi keserasian diantaranya.

**Kata Kunci :** Kinerja, Anggaran, Dinas Perpustakaan

## **ABSTRACT**

*This research was based on the background of the lack of maximum budget realization in the Lahat District Library Service. To find out the problem the theory used is the Mahmudi Ratio Theory which sees the problem from 3 indicators namely, analysis of expenditure harmony, analysis of expenditure growth and efficiency ratio. In addition, an analysis was carried out by comparing budget performance for 3 years. The research method used is a mixed method of analyzing quantitative data from financial statements in the form of targets and budget realization and qualitative methods with an analysis of the results of in-depth interviews with informants. The results showed that the budget performance in the Lahat District Library Service in 2015 to 2017 which was seen from the indicators of shopping growth ratio analysis and expenditure analysis was good. Meanwhile, if seen from the indicators of expenditure compatibility analysis, it is not good. This study recommends that the Lahat Regency Library Service must increase the value of operating expenditure and direct expenditure so that harmony between them can occur.*

*Keywords: Performance, Budget, Library Service*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “KINERJA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015-2017” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua saya ayahanda Elfa Edison SP dan ibunda Sumarni atas pengorbanan baik moril dan materil yang tiada henti selalu memberikan doa, semangat, motivasi, kepercayaan dan kasih sayang selama ini.
2. Saudara dan saudari saya Sodiq Fadli Safaat, Aghnia Bella Diena, dan Mutiara Salsabil.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fisip Unsri.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Bapak Drs. H. Joko Siswanto, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ermanovida S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pejabat dan Pegawai Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat yang telah memberikan izin dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah memberikan ilmu selama ini.
9. Seluruh Karyawan Fisip Unsri yang telah membantu penulis dalam skripsi ini.
10. Rekan-rekan seangkatan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2014.
11. Sahabat-sahabatku GSM Family.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Anggaran.....	11
1. Fungsi Anggaran.....	13
2. Tujuan Penyusunan Anggaran.....	16
3. Karakteristik Anggaran.....	17
4. Syarat-syarat Anggaran.....	18
5. Jenis-jenis Anggaran.....	18
6. Tahap-tahap Penyusunan Anggaran.....	21
B. Analisis Laporan Keuangan.....	23
1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan.....	24
2. Manfaat Laporan Keuangan.....	27
C. Pengertian Kinerja Keuangan dan Pengukuran Kinerja.....	28



D. Analisis Rasio Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.....	30
E. Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran.....	32
1. Analisis Keserasian Belanja.....	33
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	35
3. Rasio Efisiensi Belanja.....	36
F. Kerangka Pemikiran.....	37
G. Penelitian Terdahulu.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Definisi Konsep.....	42
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	44
1. Data.....	44
2. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Penentuan Informan.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	45
1. Pengumpulan Data.....	46
2. Reduksi Data.....	46
3. Penyajian Data.....	46
4. Penarikan Kesimpulan.....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sejarah Singkat Kabupaten Lahat.....	48
2. Letak Geografis Kabupaten Lahat.....	50
3. Profil Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.....	51
4. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.....	52
5. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.....	52
6. Jenis Layanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.....	53
7. Kegiatan Rutin Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.....	56
8. Waktu Pelayanan.....	58
9. Biodata Singkat Pejabat dan Staf.....	58

10. Struktur Organisasi.....	62
11. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat.....	63
B. Hasil dan Pembahasan.....	69
1. Analisis Keserasian Belanja.....	69
2. Analisis Pertumbuhan Total Belanja.....	76
3. Rasio Efisiensi Belanja.....	77
4. Hasil.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Ringkasan Anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2015, 2016, 2017.....	6
Tabel 2 Daftar Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program Dinas Perpustakaan Tahun 2017.....	7
Tabel 3 Kriteria Pengukuran Efisiensi.....	37
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 5 Fokus Penelitian.....	43
Tabel 6 Keserasian Belanja Operasional Terhadap Total Belanja.....	69
Tabel 7 Keserasian Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....	71
Tabel 8 Keserasian Belanja Langsung Terhadap Total Belanja.....	73
Tabel 9 Keserasian Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja.....	74
Tabel 10 Analisis Pertumbuhan Total Belanja.....	76
Tabel 11 Rasio Efisiensi Belanja.....	78
Tabel 12 Ringkasan Hasil Analisis Belanja.....	79

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Gedung Utama.....	8
Gambar 2. Fasilitas Komputer.....	8
Gambar 3. Koleksi Buku.....	8
Gambar 4. Gedung Perpustakaan Anak.....	8
Gambar 5. Bagan Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 6. Tugu Jam Gadang Lahat.....	48
Gambar 7. Peta Administrasi Kabupaten Lahat.....	50
Gambar 8. Gedung Utama Dinas Perpustakaan.....	51
Gambar 9. Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling.....	57
Gambar 10. Kunjungan Komunitas Sriwijaya Membaca.....	57
Gambar 11. Bagan Struktur Organisasi.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Keputusan Penulisan Skripsi.....	88
Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing.....	89
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	90
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I.....	92
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II.....	94
Lampiran 6 Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi.....	96
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	100
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	101
Lampiran 9 Lembar Revisi Skripsi.....	103
Lampiran 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.....	106
Lampiran 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.....	116
Lampiran 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.....	130

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan dinamis yang mengikuti perkembangan zaman. Keuangan negara dan daerah yang selanjutnya kita sebut sebagai keuangan negara, memegang peranan yang sangat vital terhadap jalannya pemerintahan suatu negara termasuk di Indonesia. Dengan demikian penting artinya bagi aparat pemerintahan yang menangani pengelolaan keuangan negara untuk mengerti dan mempelajari aspek-aspek yang terkait pengelolaan keuangan negara tersebut.

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan *New Public Management*.

Salah satu aspek utama yang harus dipahami tentang keuangan negara adalah dari aspek hukum dan peraturan. Aspek tersebut dapat dikatakan aspek yang paling penting karena dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan pemerintahan tentunya semua harus didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam bukunya Halim dan Bawono menyampaikan sebagai berikut:

“suka tidak suka bagi yang berminat menekuni persoalan penanganan keuangan negara-daerah harus mengenal kalau tidak memahami persoalan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait. (Halim dan Bawono, 2011)”

Indonesia saat ini terdapat paket undang-undang di bidang keuangan negara yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut antara lain UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara tersebut menandai mulai bergulirnya reformasi di bidang keuangan negara.

Saat ini masyarakat kita telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi sudah demikian maju dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dengan biaya yang relatif murah. Akibatnya masyarakat menjadi semakin cerdas sehingga lebih sulit untuk dibodohi dan dibohongi. Dalam hal pengelolaan uang publik pun, masyarakat akan semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Masyarakat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, secara langsung maupun tidak langsung melalui para penyambung lidah rakyat dari kalangan DPR/DPRD, dan LSM, dapat meminta keterangan kepada pemerintah untuk menjelaskan kasus tertentu terkait dengan rencana dan pelaksanaan program.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s. anggaran)

2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas tersebut mengidentifikasi lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematis. Maka untuk mengikis korupsi salah satu caranya adalah dengan membudayakan akuntabilitas yang juga artinya membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal akuntability*), yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2002:15).

Pengertian anggaran (*budget*) ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender yaitu mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan, tetapi ada pula yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya seperti pada masa Pemerintahan Orde Baru (Herry, 2013:1).



Biasanya lembaga eksekutif (pemerintah) yang mempersiapkan rencana penerimaan dan belanja negara/daerah termasuk pos-posnya, kemudian diajukan kepada lembaga legislatif (DPR atau DPRD) untuk dipertimbangkan dan kemudian diputuskan serta ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Dalam UUD 1945 presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan juga Undang-undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Undang-undang Keuangan Negara tahun 2003, dalam kaitannya dengan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditegaskan mengenai tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. Disebutkan pula bahwa anggaran adalah instrumen akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Setiap mendekati akhir tahun anggaran hampir selalu terjadi diskusi yang menarik mengenai penyerapan anggaran. Biasanya yang dibahas adalah kecaman-kecaman mengenai rendahnya penyerapan anggaran. Bahkan ada yang berpendapat rendahnya penyerapan anggaran adalah cerminan dari buruknya birokrasi pemerintahan.

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. *Performance based budget* lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang di lihat adalah *output* dan *outcome* nya. Hanya saja variabel pendorong pertumbuhan

perekonomian kita saat ini lebih didominasi oleh faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama lajunya pertumbuhan. Untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, makin awal pelaksanaan kegiatan, makin manfaat serta stimulusnya juga makin besar. Jika pelaksanaannya cenderung terlambat hingga ke akhir tahun padahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, maka yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak, karena manfaat yang diterima akan tertunda.

Pengertian anggaran (Mardiasmo dalam Halim 2016:91) adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Penyerapan anggaran disini adalah realisasi dari anggaran. Mungkin secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu. Secara lebih mudah rang biasa mengatakan pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, maka penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Anggaran publik merupakan kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo 2009:62). Undang-

undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting (Mardiasmo, 2002:63), yaitu:

- a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

**Tabel 1. Data Ringkasan Anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2015, 2016, 2017**

Tahun	Jenis Laporan	
	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
2015	3.437.569.000,00	3.001.000.000,00
2016	4.531.888.000,00	2.672.768.000,00
2017	4.417.057.000,00	3.705.637.000,00

*Sumber: Bendahara Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat*

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan jumlah Ringkasan Anggaran dari tahun 2015, 2016 dan 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Dinas Perpustakaan ini adalah salah satu SKPD yang berada di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Belanja daerah Kabupaten Lahat tahun 2017 dalam rancangan kesepakatan kebijakan umum APBD sebesar Rp1,79 triliun, hal itu disampaikan panitia khusus DPRD Lahat dalam rapat paripurna ke-X pada masa persidangan ketiga. Juru Bicara (Jubir) Pansus III Wanhar Husen mengungkapkan bahwa:

“Besaran angka tersebut berdasarkan hasil pembahasan dalam alokasi target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2017. Semua kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat hendaknya dapat dianggarkan dalam APBD 2017. Agar tim anggaran pendapatan daerah (TAPD) lebih proaktif sehingga rancangan kesepakatan kebijakan umum APBD maupun PPAS dapat tepat waktu. Selain itu perlu pula memperhatikan jadwal pembahasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku”

**Tabel 2. Daftar Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program Dinas  
Perpustakaan Tahun 2017**

No	Kegiatan Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	810.490.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.486.000,00
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.000.000,00
4.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	674.034.000,00
5.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	6.000.000,00
6.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah	30.000.000,00
7.	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	50.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>		1.975.000.000,00

*Sumber: Bendahara Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat*

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan jumlah anggaran dan program yang telah direncanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2017. Dapat dilihat berdasarkan Daftar Rekapitulasi Belanja Langsung diatas jumlah anggaran dari semua program yang direncanakan mencapai angka Rp 1.975.000.000 untuk jangka waktu satu

tahun kedepan. Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat berusaha memberikan pelayanan kegiatan dan program-program terbaik demi meningkatkan pelayanan perpustakaan di Kabupaten Lahat. Dan diharapkan program-program tersebut dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin. Kemudian dapat menjadikan kabupaten Lahat yang cerdas sesuai dengan visi misi Bupati Lahat.

Gambar 1, 2, 3 dan 4 di bawah ini menunjukkan kondisi Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat saat ini. Mulai dari gambar 1 yang merupakan bangunan gedung utama, Gambar 2 merupakan fasilitas komputer dan internet yang disediakan dinas perpustakaan, Gambar 3 adalah koleksi buku yang tersedia, dan Gambar 4 menunjukkan bangunan perpustakaan khusus anak.



Gambar 1. Gedung Perpustakaan



Gambar 2. Fasilitas Komputer



Gambar 3. Koleksi Buku



Gambar 4. Ruang Baca Anak

*Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi*

Namun permasalahan yang ditemukan oleh penulis saat wawancara informan di lapangan adalah Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Perpustakaan kabupaten Lahat tahun anggaran 2017 ternyata tidak terealisasikan hingga 100 persen (hanya 60 persen) oleh pemerintah pusat, sehingga beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya oleh dinas terkait tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kajian kinerja keuangan negara dan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Lahat, maka tema yang akan diangkat berjudul sebagai berikut “KINERJA ANGGARAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN LAHAT”. Kajian penelitian skripsi ini dengan menggunakan teknik metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik informan melalui pelaksanaan wawancara mendalam dan menganalisis data yang tersedia secara akurat di kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tidak terealisasi 100 persen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak terealisasinya 100 persen anggaran Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih pemahaman kepada Ilmu Administrasi Negara khususnya Keuangan Negara dalam konsep Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi kantor pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat untuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan Pengelolaan Anggaran Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Rappang: Gava Media.
- Anngarini, Yunita dan Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Faud, Moh. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamaroesid, Herry. 2013. *Sistem Administrasi Anggaran Negara*. Medan: MitraWacana Media.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Singarimbun, Masri. 1994. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparmoko.2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi 6. Purwokerto: BPFE-Yogyakarta.
- Thoha . Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.



**Dokumen:**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Foto keadaan bangunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat

Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 Dan 2014

Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 Dan 2015

Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 Dan 2016

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat

Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017

Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016

Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015

Tabel Daftar Nama Jenis Buku Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat